

**LAPORAN PENELITIAN**

**KORELASI ANTARA NILAI TATA NEGARA HASIL EBTANAS  
DI SMA DENGAN NILAI HUKUM TATA NEGARA  
MAHASISWA JURUSAN PMP / KN  
FPIPS IKIP PADANG**

2384 / 192



Oleh

**DRS. AKMAL**  
( Ketua Tim Peneliti )

Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang  
Tahun Anggaran 1990/1991  
Surat Perjanjian Kerja No.: 60/PT37.H9/N.9/1990  
Tanggal 1 September 1990

UKIP

---

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG**

**1 9 9 1**

Laporan Penelitian

KORELASI ANTARA NILAI TATA NEGARA HASIL EBTANAS  
DI SMA DENGAN NILAI HUKUM TATA NEGARA  
MAHASISWA JURUSAN PMP/KN  
FPIPS IKIP PADANG

Personalia Peneliti

Konsultan : Drs. Syafnil Effendi, S.H.  
Ketua : Drs. Akmal  
Anggota : 1. Drs. Yasril Yunus  
2. Drs. Karjuni Datuk Ma'ani

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP. PADANG

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
RESEPTOR TGL	Januari 1992
SUMBER HARGA	HD
ADRES	KK 1
INVENTARIS	2389/HD/92 - KDU
CALL NO	371.26 Akim K0

## ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul dengan "Korelasi Nilai EBTA Murni Tata Negara Dengan Nilai Hukum Tata Negara Mahasiswa Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang" dengan rumusan masalah "Apakah terdapat hubungan yang berarti antara Nilai EBTA Murni Tata Negara dengan nilai mata kuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang". Sebelum penelitian ini diselenggarakan maka peneliti telah mengajukan hipotesis kerja yang berbunyi: terdapat hubungan berarti antara nilai EBTA Murni Tata Negara dengan nilai Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program D<sub>3</sub> Bp.88, S<sub>1</sub> Bp. 87 dan 87 yang mempunyai nilai EBTA Murni Tata Negara dan telah lulus mata kuliah Hukum Tata Negara jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang, sedangkan yang dijadikan sampel adalah seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria populasi diatas. Jadi teknik Pengambilan sampel adalah total sampling.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini ini digunakan teknik analisis korelasi product moment.

Dari hasil penelitian ternyata tidak terdapat hubungan yang berarti antara nilai EBTA Murni dengan nilai Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang, karena diperoleh harga  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  pada tabel product moment untuk ketiga kelompok sampel. Dengan kata lain hipotesis nihil diterima

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Asumsi.....	4
E. Hipotesis.....	5
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
G. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Reviu Kepustakaan.....	8
B. Kerangka Konseptual.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel.....	13
B. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	14
C. Teknik Analisa Data.....	16
D. Prosedur Penelitian.....	18
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis.....	19
B. Pembahasan.....	25
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran-saran.....	27
DAFTAR BACAAN.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Mahasiswa Yang Dijadikan Sampel.....	14
Tabel 2.	Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data.....	16
Tabel 3.	Tabel Persiapan Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara NEM Tata Negara dengan Nilai Hukum Tata Negara S <sub>1</sub> 87.....	19
Tabel 4.	Tabel Persiapan Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara NEM Tata Negara dengan Nilai Hukum Tata Negara S <sub>1</sub> 88.....	21
Tabel 5.	Tabel Persiapan Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara NEM Tata Negara dengan Nilai Hukum Tata Negara D <sub>3</sub> 88.....	23

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa: Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi, baik antara sektor pendidikan dan sektor-sektor pembangunan lainnya, antar daerah maupun antar berbagai jenjang dan jenis pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, perlu disesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian disegala bidang serta ditingkatkan mutunya sesuai dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan serta teknologi (TAP. MPR II/MPR/1978)

Berpedoman kepada ketetapan di atas, SMTA, IKIP Padang sebagai satu lembaga pendidikan, tentu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sektor pendidikan secara keseluruhan. Oleh sebab itu sebagai lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, segenap personil hendaknya selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas, usaha lain yang telah dilaksanakan adalah dengan memperbarui kurikulum. Untuk Sekolah menengah Tingkat Atas pada saat sekarang ini berlaku kurikulum 84. Para siswa

dikelompokkan atas beberapa program yaitu program A1 (Fisika), A2 (biologi), dan A3 (sosial).

Khusus untuk siswa yang tergolong pada program A3 diberikan mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Sastra Indonesia, Sosiologi, Bahasa Inggris dan Tata Negara dan lain sebagainya. Dari sekian banyak mata pelajaran itu maka ada mata pelajaran yang harus diselesaikan melalui Evaluasi Tahap Akhir dan Evaluasi Tahap Akhir Nasional. Salah satu yang dievaluasi secara Nasional (EBTANAS) adalah mata pelajaran Tata Negara.

Untuk dapat berhasil dengan baik dalam EBTANAS maupun bentuk ujian lain sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor itu antara lain kemampuan guru, fasilitas, kurikulum, lingkungan, ekonomi orang tua dan lain-lain. Suatu hal yang tak kalah pentingnya adalah raw input karena segala kegiatan yang berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan merupakan suatu proses raw input menjadi out put (hasil) yakni para tamatan yang berkualitas.

Bagi mereka yang dapat berhasil lulus di SMTA, yang berminat sebagai pendidik/guru dapat memilih berbagai jurusan di IKIP Padang. Salah satu dari sekian banyak jurusan tersebut adalah PMP/KN. Di jurusan ini para mahasiswa dipersiapkan sebagai tenaga pengajar dalam dua bidang studi nantinya yaitu untuk mata pelajaran PMP dan



mata pelajaran Tata Negara. mengingat di SMTA mata pelajaran Tata Negara adalah suatu bidang studi, maka dibutuhkan tenaga pengajar yang profesional dalam bidang tersebut.

Mahasiswa jurusan PMP/KN yang berasal dari program A3 di SMTA, telah mempelajari konsep-konsep dasar ketata negaraan sebagai dasar untuk mendalami atau mempelajari lebih lanjut mata kuliah hukum Tata Negara di Jurusan. Dengan harapan bagi mahasiswa yang mempunyai nilai Ebtanas bidang studi tata negara yang tinggi akan dapat berhasil dengan baik pula dalam perkuliahan Hukum Tata negara di jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang. Sebaliknya mereka yang memperoleh NEM Tata Negara yang rendah di SMA juga kan rendah hasil belajarnya pada perkualiahan Hukum Tata Negara. Namun dari pengamatan penulis masih banyak terjadi sebaliknya.

Bertolak dari kenyataan maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut, dimana penelitian ini diberi judul Korelasi Antara Nilai Tata Negara Hasil Ebtanas di SMA Dengan Nilai Hukum Tata Negara Mahasiswa Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

"Apakah terdapat hubungan yang berarti antara nilai Tata Negara Hasil Ebtanas dengan nilai Hukum Tata Negara mahasiswa Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang?"

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas serta informasi yang diharapkan maka penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. nilai ebta murni Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang
2. nilai matakuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang
3. hubungan nilai ebta murni Tata Negara dengan nilai Hukum Tata Negara mahasiswa Jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang.

#### D. Asumsi

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti mengemukakan anggapan dasar sebagai pedoman terhadap masalah yang akan diteliti sesuai dengan kemampuan peneliti. Adapun anggapan dasar pada penelitian ini adalah :

1. Nilai ebta murni Tata Negara yang diperoleh mahasiswa pada waktu SMA merupakan cerminan kemampuan hasil belajar mahasiswa pada mata pelajaran itu.

2. Nilai ehta murni yang diperoleh siswa didasarkan pada kriteria yang sama
3. Nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan cerminan kemampuan mahasiswa pada mata kuliah itu
4. Pemberian nilai oleh dosen mata kuliah Hukum Tata Negara kepada mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang didasarkan pada kriteria yang sama.

#### E. Hipotesis

Berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan maka yang menjadi hipotesis pada penelitian adalah:

##### 1. Hipotesis nihil ( $H_0$ )

Tidak terdapat hubungan yang berarti antara nilai Tata Negara hasil ebtanas dengan nilai mata kuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang

##### 2. Hipotesis kerja ( $H_1$ )

Terdapat hubungan yang berarti antara nilai Tata Negara hasil ebtanas dengan nilai mata kuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh input yang berguna bagi tenaga pengelola

kependidikan terutama untuk:

1. mempelajari apakah nilai ebtanas murni perlu atau tidak dipertimbangkan untuk penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jurusan yang mereka pilih
2. staf pengajar supaya mempedomani dalam mempersiapkan dan melanjutkan pelajaran yang erat kaitannya dengan Tata negara di SMA pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
3. staf pengajar untuk mempersiapkan secara lebih baik calon guru bidang studi Tata Negara di SMA.

#### G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran terhadap pemakaian istilah atau kata-kata yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan atau batasan sehingga terdapat suatu titik tolak pemikiran dalam arti dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Korelasi

adalah hubungan timbal balik (Sutrisno, 1984). Dengan demikian hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan antara nilai Tata Negara hasil Ebtanas di SMA dengan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP. PADANG

nilai mata kuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan  
PMP/KN FPIS IKIP Padang

2. Nilai ebta murni Tata negara

adalah hasil belajar yang diperoleh siswa sewaktu  
menamatkan pelajaran Tata negara di Sekolah menengah  
Atas.

3. Nilai Hukum Tata Negara

adalah hasil belajar mata kuliah Hukum Tata Negara  
setelah mengikuti ujian akhir pada jurusan PMP/KN IKIP  
Padang

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Reviu Kepustakaan

Di sekolah anak didik akan dibina dengan seperangkat bidang studi yang tertuang dalam kurikulum (GBPP). Diantara bidang studi itu adalah bidang studi Tata Negara yang dipelajari oleh siswa program A3 mulai dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 Sekolah Menengah Atas. Sebagai salah satu bidang studi yang wajib diikuti oleh siswa program A3 (sosial).

Sebagian dari tamatannya ada yang kuliah pada jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang. Pada jurusan ini mereka wajib mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara. Keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah ini juga ditentukan oleh kemampuan dasar/pengetahuan awal yang berhubungan dengan materi perkuliahan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Prayitno, 1985:7) bahwa: Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang akan dipelajarinya maka mereka akan penuh minat untuk mempelajari kelanjutan pelajaran tersebut. Dengan kata lain mereka telah mempunyai kesiapan mental untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan bagi mereka yang telah mempunyai kesiapan mental tersebut ingin memenuhi kebutuhan belajarnya dan melakukan kegiatan itu dengan tekun.

Kemampuan dasar yang dimaksud diatas untuk mata kuliah Hukum Tata Negara adalah pengetahuan mahasiswa

tentang materi bidang studi Tata Negara yang dipelajarinya di SMA. Jika mahasiswa tersebut telah memahami materi pelajaran Tata Negara dengan baik, diharapkan mereka dalam mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara Di jurusan PMP/KN akan mudah mencerna atau memahami materinya. Pelajaran yang merupakan kelanjutan dari pengalaman yang lampau, akan terasa manfaat atau faedahnya bagi seseorang. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Sawunggalung.M, 1983: 154) yaitu belajar akan sangat berfaedah bila belajar merupakan kelanjutan dari pengalaman yang diperolehnya sehingga ada kontinuitas atas perubahan tingkah laku seseorang.

Disamping itu mempelajari sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang telah diketahui dapat menimbulkan minat belajar yang lebih tinggi. Khusus dalam hal ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan Hukum Tata Negara dengan hasil yang memuaskan untuk mahasiswa yang mempunyai hasil belajar Tata Negara di SMA yang baik pula.

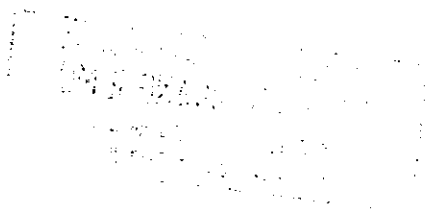
Tinggi rendahnya hasil belajar mata pelajaran Tata Negara mahasiswa di SMA ini dapat diketahui dari nilai ebta murni mereka. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh ( Ad. Rooijackers DA,1988) bahwa alat ujian digunakan dengan maksud untuk mengukur apakah dikemudian hari dapat diharapkan suatu hasil atau orang mencoba memperhitungkan apakah seseorang dikemudian waktu akan

dapat belajar dengan baik dan berhasil. Berarti bagi mahasiswa yang mempunyai nilai mata pelajaran Tata Negara yang tinggi diharapkan mereka akan dapat mengikuti perkuliahan dan berhasil dengan baik pula.

Jadi hasil ujian atau tes dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkirakan kemampuan seseorang sebagai modal untuk belajar lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Anne Anestesi, 1976) bahwa tes berguna sebagai alat yang dapat meramalkan proses belajar dimasa datang. Jika seseorang memperoleh hasil yang memuaskan pada suatu bidang studi, bagaimanapun juga mereka pasti ingin memperoleh hasil yang memuaskan atau lebih memuaskan pada kesempatan berikutnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Suharsimi Arikunto, 1984:86) yaitu jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hal ini menyenangkan tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain. Akibatnya siswa akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat agar lain kali mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Jadi kalau seseorang pernah memperoleh hasil belajar yang baik, hal ini akan dapat membangkitkan motivasi belajarnya lebih lanjut. Seseorang yang belajar penuh dengan motivasi tentu dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Selanjutnya hasil penelitian (Edwin Musdi, 1987:15) menyatakan bahwa untuk meramalkan prestasi matematika



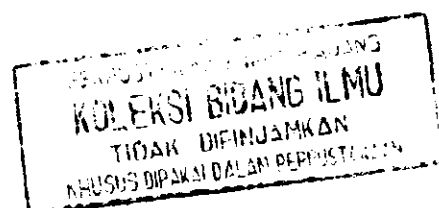


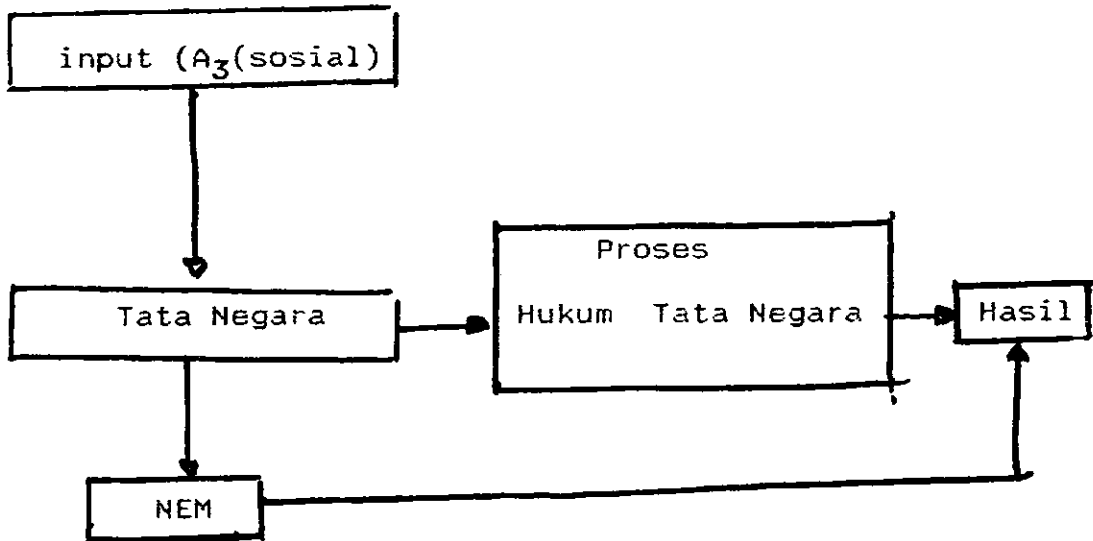
seseorang di SMA, lihatlah prestasinya di SMP. Begitu juga pada penelitian ini bagi mereka yang mempunyai nilai tinggi pada bidang studi Tata Negara Di SMA diharapkan akan memperoleh nilai yang tinggi pula pada mata kuliah Hukum Tata negara di jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang.

## B. Kerangka Konseptual

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahwa mahasiswa yang kuliah di jurusan PMP/KN ada yang berasal dari program A<sub>3</sub> (sosial) di SMA. Mereka ini memperoleh mata pelajaran Tata Negara. Hasil belajarnya selama di SMA ini untuk mata pelajaran tersebut akan tercermin pada nilai ebta murni mata mata pelajaran itu. Mereka yang mempunyai nilai tinggi akan mempunyai kemampuan yang tinggi pula untuk mata pelajaran itu.

Pada jurusan PMP/KN mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara. Menurut hemat penulis sedikit banyaknya mata pelajaran ini mempunyai hubungan dengan matakuliah Hukum Tata Negara. Hubungan yang penulis maksud adalah dalam hal materinya. Untuk itulah penulis ingin melihat apakah terdapat hubungan antara nilai ebta murni Tata Negara dengan nilai Hukum Tata Negara. Untuk jelasnya hubungan itu dapat dilihat pada diagram disebelah ini.





MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP. PADANG

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan di atas maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan korelasional. Yakni menggambarkan nilai ebtanas murni bidang studi Tata Negara dan nilai mata kuliah Hukum Tata Negara serta hubungan antara keduanya.

Adapun yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah nilai EBTA Murni Tata Negara dan sebagai variabel terikat adalah nilai Hukum Tata Negara.

#### A. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang yang telah lulus mata kuliah Hukum Tata Negara dan mempunyai nilai ebta murni bidang studi Tata Negara di SMA, program D<sub>3</sub> BP.88, S<sub>1</sub> BP. 88 dan BP 87 yang memenuhi ketentuan tersebut diatas. Jumlah dari seluruh populasi itu adalah 54 orang.

##### 2. Sampel

Mengingat bahwa tidak seluruhnya mahasiswa PMP/KN berasal dari jurusan A3 (sosial) di SMA dan belum semua tingkat/program yang telah mengambil hukum Tata Negara maka yang dijadikan sampel pada penelitian ini

adalah mahasiswa S1 Bp. 87, D3 Bp. 88 dan S1 Bp. 88, sebagaimana yang dinyatakan diatas. Jaditeknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Mahasiswa yang berasal dari jurusan A1 dan A2 serta yang transfer (guru) tidak dijadikan sebagai sampel karena mereka tidak mendapatkan pelajaran Tata Negara Di SMA. Jadi teknik sapling yang digunakan adalah total sampling

TABEL I  
Jumlah Mahasiswa Yang Dijadikan Sampel

NO.	TH.MASUK	PROGRAM	JUMLAH	
			(D3)	(S1)
1.	1987			18
2.	1988		23	13

## B. Jenis Data, Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpul Data

### 1. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini, maka diperlukan data sebagai berikut:

- a. Data tentang ehta murni mata pelajaran Tata Negara
- b. Data tentang hasil belajar mata kuliah Hukum Tata Negara

Data ini diperoleh dari kantor registrasi IKIP Padang. Jadi jenis data ini adalah data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang menyangkut hasil belajar Hukum Tata Negara diperoleh dari kantor registrasi IKIP Padang dan data tentang ehta murni mata pelajaran Tata Negara juga diperoleh dari kantor registrasi IKIP Padang.

## 3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

### a. Teknik Pengumpul Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu: mencatat dokumen nilai / hasil belajar dan nem mahasiswa diambil dari kantor registrasi.

### b. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini disesuaikan dengan teknik penumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik dokumenter.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Kalau ada hubungan, apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan taraf kepercayaan 95%. Jika harga yang diperoleh itu lebih besar dari harga  $r$  yang ada dalam tabel berarti hipotesis kerja diterima atau sebaliknya.

#### D. Prosedur Penelitian

Beberapa tahap kerja yang dilalui sampai selesainya laporan penelitian ini adalah setelah usulan proposal diterima, maka disiapkan terlebih dahulu alat pengumpul data dalam hal ini berupa blanko isian yang berisi keterangan tentang

1. nama mahasiswa
2. nilai ebta murni Tata Negara
3. nilai Hukum Tata Negara

Setelah blanko isian disiapkan, mulai diambil data. Untuk nilai NEM diambil pada kantor Registrasi IKIP Padang. Sedangkan untuk nilai Hukum Tata Negara diambil pada jurusan PMP/KN IKIP Padang. Setelah data terkumpul semua baru dimulai mengolah data dengan pola-pola yang telah ditentukan. Kemudian penyerahan draf laporan untuk diadakan monitoring/ penilaian terhadap laporan tersebut, menyusun laporan akhir untuk diperbaiki, pencetakan hasil laporan dan akhirnya penyerahan laporan.

Kalau dibandingkan dengan harga  $r$  pada tabel product moment untuk  $N = 18$  dan signifikansi 5% diperoleh harga sebesar 0,468. Berarti  $r$  tabel lebih besar dari  $r$  hitung.

Berikutnya diolah data untuk sampel yang berasal dari mahasiswa  $S_1$  Bp. 88

Tabel 4

Tabel persiapan untuk mencari koefisien korelasi antara nilai Nem Tata Negara dengan nilai Hukum Tata negara  $S_1$ .88

No.	X (nilai T. Negara)	Y (nilai HTN)	XY
1.	7.	1	7
2.	8	1	8
3.	8	2	16
4.	9	1	9
5.	9,7	2	18,34
6.	7	23	14
7.	6,58	3	19,74
8.	5,17	1	5,17
9.	7	2	14
10.	7,25	1	7,25
11.	6,42	1	6,42



12.	6	1	6
13.	6	1	6
-----			
jumlah	92,59	19	136,92
-----			

Jadi  $X = 92,59$

$Y = 19$

$XY = 136,92$

sedangkan dengan kalkulator langsung diperoleh :

$$X^2 = 675,59$$

$$Y^2 = 33$$

lalu digunakan rumus:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \{ N \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \}}$$

$$r = \frac{13 \cdot 136,92 - 92,59 \cdot 19}{\sqrt{13 \cdot 675,89 - (92,59)^2} \{ 13 \cdot 33 - (19)^2 \}}$$

$$r = 0,172147$$

Kalau dibandingkan dengan harga r pada tabel produc moment untuk  $N = 13$  dan signifikansi 5% diperoleh harga sebesar 0,13366 Berarti r tabel lebih kecil dari r hitung.

Tabel 5

Tabel persiapan untuk mencari koefisien korelasi  
antara nilai nem Tata Negara dengan nilai Hukum Tata negara

D<sub>3</sub>.88

No.	X (nilai T. Negara)	Y (nilai HTN)	XY
1.	7,50	3	22,5
2.	8,50	2	17,0
3.	6,66	3	19,98
4.	6,75	2	13,5
5.	6,50	2	13,0
6.	7,50	2	13,5
7.	8,59	2	17,18
8.	7,59	1	7,59
9.	6,17	3	20,1
10.	6,58	1	6,58
11.	6,91	2	13,82
12.	6,12	1	6,12
13.	7,50	1	7,50
14.	7,25	2	15,50
15.	8,17	22	16,24
16.	6,75	2	13,50
17.	6,67	1	6,67
18.	8,50	2	17,00

19.	7	1	7
20.	6,5	2	13,00
21.	7,5	2	15,00
22.	6,5	1	6,59
23.		1	7

---

jumlah    163,41                      41                      295,87

---

Jadi  $\Sigma X = 163,41$

$\Sigma Y = 41$

$\Sigma XY = 295,87$

sedangkan dengan kalkulator langsung diperoleh .

$$\Sigma X^2 = 1200,4797$$

$$\Sigma Y^2 = 83$$

lalu digunakan rumus:

$$r = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \{ N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2 \}}$$

$$r = \frac{23 \cdot 295,87 - 163,41 \cdot 41}{\sqrt{23 \cdot 1200,4797 - (163,41)^2} \{ 23 \cdot 83 - (41)^2 \}}$$

$$r = 0,$$

Kalau dibandingkan dengan harga r pada tabel product moment untuk  $N = 23$  dan signifikansi 5% diperoleh harga sebesar

0,1455. Berarti  $r$  tabel lebih besar dari  $r$  hitung.

Jadi untuk sampel mahasiswa program S1 bp. 87  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel, dan untuk mahasiswa program S1 BP.88  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan untuk mahasiswa program D3.88  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang dari pengolahan data dimana untuk kedua jenis sampel baik untuk program S1 87, dan D3 88 diperoleh bahwa  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel untuk taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bahwa tidak terdapat korelasi yang berarti antara nilai ebta murni mata pelajaran Tata Negara dengan nilai hukum Tata Negara mahasiswa jurusan Pendidikan Moral Panca Sila/KN FPIPS IKIP Padang. Jadi penguasaan mahasiswa terhadap materi pelajaran Tata Negara sewaktu mereka berada di SMA tidak memberikan andil dalam mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara di Jurusan PMP/KN. Mereka yang memperoleh nilai yang tinggi pada mata pelajaran Tata Negara di SMA yang dilihat dari nilai ebta murni yang mereka peroleh, belum tentu akan menunjukkan hasil belajar yang tinggi untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.

Untuk mahasiswa program D3 BP.88 ternyata terdapat korelasi pada taraf kepercayaan 95%.

Dengan demikian untuk mahasiswa program S1. BP.87 dan S1 BP.88 hipotesis kerja ditolak dan hipotesis nol diterima dan sebaliknya pada mahasiswa program D3. Bp.88

## BAB V

### PENUTUP

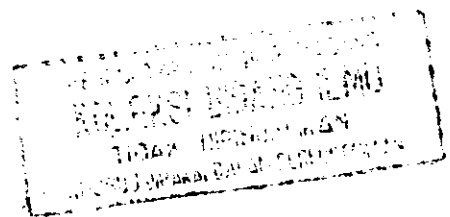
#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat hubungan yang berarti antara nilai ebta murni mata pelajaran Tata Negara di SMA dengan nilai mata kuliah Hukum Tata Negara mahasiswa jurusan PMP/KN FPIPS IKIP Padang.
2. Mahasiswa yang mempunyai nilai ebta murni yang tinggi, belum tentu mampu mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara dan berhasil dengan baik.
3. Dari kesimpulan nomor 2 dapat dinyatakan bahwa dalam mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara mahasiswa mengalami kesulitan-kesulitan

#### B. Saran-saran

1. Sehubungan dengan kesimpulan di atas perlu adanya perhatian khusus dari dosen Hukum Tata Negara untuk memperhatikan nilai ebta murni mata pelajaran Tata Negara sebelum memulai perkuliahan Hukum Tata Negara, karena bagaimanapun juga mata pelajaran Tata



Negara adalah dasar untuk melanjutkan atau mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara. Bisa saja. Ketidadaanya hubungan ini karena kemampuan minimal untuk mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara ini belum dimiliki mahasiswa, sehingga mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam mengikuti perkuliahan.

2. Karena banyaknya hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar Hukum Tata Negara maka berarti dalam mengikuti perkuliahan ini mahasiswa menemui berbagai macam kesulitan, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP. PADANG

## DAFTAR BACAAN

- Ad., Rooijackers. (1988). Mengajar dengan Sukses. Jakarta: PT Gramedia.
- Anne, Anestesi. (1976). Psychology Testing. New York: The Mchellan.
- Arikunto, Suharsimi. (1986). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Dep. P dan K. (1984). Pelaksanaan Kurikulum 1984. Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. (1986). Tentang Nilai EBTANAS Murni Kep. No.: 235/C/085/1986.
- Hadi, Sutrisno. (1973). Statistik Jilid 2. Yogyakarta: Fakultas Psychologi UGM.
- Idris, Zahara. (1987). Dasar-dasar Kependidikan. Padang: Angkasa Raya.
- CS T, Cansil. (1979). Pelajaran Tata Negara untuk Program A3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayitno. (1986). Metode Penyajian Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta.
- Sujana. (1989). Method Statistk. Bandung: Tarsito.